Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Normative Review Authorization By KPK For Money Laundering Action

Sarmadan Pohan*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

*Corresponding Email: sarmadan.pohan@um-tapsel.ac.id

Diterima: Juni 2019; Disetujui: Oktober 2019; Dipublish: Oktober 2019

Abstrak

Perdebatan persoalan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar hukum kewenangan penuntutan KPK atas tindak pidana pencucian uang dan kedudukan kewenangan penuntutan oleh KPK atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang. Metode Penelitian ini bersifat normatif, dimana penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Secara *Ius Constitutum* atau apa yang berlaku dalam sebuah aturan ataupun lebih dikenal dengan undang-undang maka KPK tidak memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, berbeda halnya secara empirik dengan melihat apa yang terjadi dalam masyarakat bahwa KPK dirasa perlu untuk melakukan penuntutan atas TPPU yang dimana TPPU merupakan *double-track* criminality dimana terdapat tindak pidana asal dan lanjutan, jikalau TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal secara empiris maka Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melakukan penuntutan karena masih memiliki kewenangan.

Kata Kunci: Kewenangan Penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pencucian Uang

Abstract

*Debate over the issue of the authority of the corruption eradication commission in conducting investigations, investigations and investigators. The purpose of this study is to examine the legal basis for the authority to prosecute KPK for money laundering and the position of the authority to prosecute corruption eradication commissions for money laundering crimes in the future. This research method is normative, in which research of document studies using a variety of secondary data. The results obtained from this study are that the Article 6 of Law Number 30 of 2002 that the KPK only has authority in conducting investigations, investigations and prosecutions of money laundering crimes. In *Ius Constitutum* or what applies in a regulation or better known as the law, the Corruption Eradication Commission does not have the authority to prosecute money laundering, different empirically different from seeing what happens in society that the KPK is deemed necessary to prosecute a laundering crime in TPPU is a double-track criminality in which there is an original and advanced crime, if the money laundering is a further criminal act of corruption as an original criminal act empirically then the Eradication Commission Corruption continues to prosecute because it still have a rights*

Key words: *authority, prosecution, commission of corruption eradication, money laundering*

How to Cite: Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (2): 117-134

PENDAHULUAN

Hukum selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan dimasyarakat, karena banyak pendapat yang akan muncul mulai dari orang tidak paham mengenai hukum sehingga pendapat orang yang fasih akan hukum, mulai dari pendapat mahasiswa dan pendapat para akademisi sampai pendapat para praktisi hukum.

Hukum mempunyai beraneka keberagaman dalam sudut pandang mengenai hukum, dimana hukum bertujuan untuk menciptakan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum, tentunya masalah ini sangat menarik untuk dibahas. Berbagai keberagaman pendapat mengenai hukum tentu tidak dapat lepas untuk membicarakan masalah dalam hukum itu sendiri. Dimana masih ada saling tumpang tindih atau hukum melakukan suatu yang overlap antara satu dengan yang lain.

Peristiwa pidana pada tahun 2013 terjadi kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat, yaitu kasus suap impor daging sapi dimana perkara di perankan oleh 5 terdakwa yakni Arya Abdi Effendi, Juardi Effendi, Elizabeth Liman, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Tindak pidana ini bermula ketika terjadi pertemuan antara Ahmad Fathanah selaku

direktur utama PT Atlas Jaringan salah satu orang kepercayaan dari Luthfi Hasan Ishaaq selaku komisaris PT Atlas Jaringan, kemudian satu lagi bersama Elizabeth Liman selaku direktur utama PT Indoguna Utama untuk membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, tetapi pengajuan penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama ditolak oleh Menteri Pertanian setelah saat itu mereka mencoba keluar pada sistem yang ada pada saat itu (Putusan Pengadilan DKI, 2014).

Kalau kita melihat secara seksama dakwaan yang dikenakan oleh JPU Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Luthfi Hasan Ishaaq beserta Ahmad Fathanah. Maka, selain tindak pidana korupsi mereka berdua juga didakwa oleh JPU telah melakukan TPPU. KPK berwenang untuk menuntut perkara selain daripada kejahatan korupsi. Padahal dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang selanjutnya disingkat dengan KPK, sama sekali tidak dijelaskan apakah KPK boleh melakukan penuntutan selain daripada perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya aturan dalam hukum pidana terbagi atas 2 bagian yakni hukum pidana materiil yang dapat disebut sebagai hukum pidana yang abstrak dapat pula

disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam yang sumber utamanya adalah KUHP sedangkan hukum pidana formiil atau yang biasa disebut dengan hukum pidana proses atau hukum pidana yang keadaan bergerak biasa sering disebut dengan KUHAP. Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang yang bersifat materiil (*substantif*) ataupun Undang-Undang yang bersifat formiil (*prosedural*) tidak digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan seperti antara UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. (Adami Chazawi, 2002).

Indonesia sendiri memiliki banyak undang-undang yang bersifat formiil dan materiil digabungkan dalam satu peraturan-undangan yang sama. Misalnya, UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan lain-lain. Akibatnya banyak masalah hukum yang timbul mulai saling tumpang tindihnya pasal yang satu dengan yang lainnya, terjadinya *overlapping* dalam proses hukum.

Undang-Undang yang dibuat pada dasarnya mengandung norma dua makna yaitu Mandator, memerintahkan untuk

melakukan sesuatu, biasanya ada kata wajib, dapat, berwenang. Perintah untuk tidak melakukan sesuatu biasanya ada kata dilarang.

Karakter larangan apabila tidak dilarang berarti dibolehkan. Jika merumuskan larangan haruslah rinci terhadap suatu aturan diberlakukan secara peraturan perundang-undangan yang positif, lalu subjek hukumnya yaitu pejabat public. Maka yang dirumuskannya wajib atau berwenang tapi bila subjeknya adalah orang dan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai dasar hukum kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan kedudukan KPK sebagai atas TPPU di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji dengan menggunakan studi dokumen yakni memakai data sekunder, yang mengambil bahan dari buku-buku, teori hukum, dan peraturan yang berlaku. (Salim dan Erlies Septiana Nurbana, 2013).

Sumber data penelitian buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah Alat pengumpulan data yang dipergunakan

adalah studi dokumentasi (*library research*). Data bersumber dari data sekunder yang akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.

Analisis data yaitu deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara jelas dengan menghubungkan antara variabel-variabel yang berkaitan dengan objek penelitian dan dibahas secara kualitatif serta selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dengan menerangkan, menguraikan serta menggambarkan masalah yang erat hubungannya dengan objek penelitian ini sehingga dapat menarik kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penuntutan Atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Jeremy Bentham, *petito principii* atau mengajukan pertanyaan adalah salah satu *sophisme* yang dicatat Aristoteles mengajukan pertanyaan atau lebih tepatnya, memperkirakan pertanyaan adalah menggunakan dalil yang tengah diperdebatkan, seolah-olah dalil itu sudah terbukti kebenarannya. (Jeremy Bentham, 2013).

Apabila dikaitkan dengan kasus suap impor daging Luthfi Hasan Ishaq dimana instansi penegak hukum yang memulai penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan adalah KPK, hal ini memang biasa saja tetapi menjadi luar biasa ketika KPK juga menuntut Luthfi Hasan Ishaq dengan dakwaan tindak pidana selain dari Tindak Pidana Korupsi yakni TPPU. Terlepas dari Luthfi Hasan Ishaq banyak pejabat-pejabat negara yang kemudian didakwa oleh KPK dengan dakwaan selain dari tindak pidana korupsi yakni tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah kasus Nazaruddin, Djoko Susilo dan lain sebagainya, hal ini kemudian sangat aneh karena secara fundamental KPK didirikan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka timbul pertanyaan apakah kemudian KPK berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana selain dari pada tindak pidana korupsi.

Pencucian uang atau bisa kita sebut sebagai *money laundering* merupakan hal yang baru di Indonesia, konsepsi mengenai pencucian uang bisa kita bilang sebagai konsep baru sebuah kejahatan di Indonesia tetapi meskipun terbilang relatif baru di Indonesia, sudah banyak perbincangan hangat terkait dengan

indikasi praktik pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat negara. Selain dari hal pencucian uang sorotan juga mulai mengarah kepada dunia peradilan yakni mengenai penanganan kasus korupsi. Bagaimana kemudian terdakwa terbukti bersalah atau sebaliknya tidak terbukti bersalah yang diajukan ke sebuah persidangan disertai dengan tuntutan kerugian negara.

Dugaan dilakukannya praktik pencucian uang mulai banyak terlihat, ditambah dengan eksistensi dari pengadilan tipikor yang mulai mencuat atau menunjukkan keberadaannya melalui beberapa putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan terhadap beberapa pemangku jabatan negara, terkait dengan pencucian uang.

Mengenai pencucian uang sangat penting dibahas dikarenakan berkaitan dengan berbagai kejahatan atau dapat kita katakan sebagai kejahatan ganda dimana terdapat kejahatan asal dan tindakan pencucian uang sebagai kejahatan berlanjut. Berbicara mengenai kejahatan ganda dimana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan dan harus diawali terlebih dahulu dengan tindak pidana utama atau tindak pidana asal. Terlebih kita harus melihat tindak pidana apa saja yang dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana utama atau tindak pidana asal dari tindak pidana *money laundering* itu sendiri.

Peraturan terbaru dari kejahatan pencucian uang yakni UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU menjelaskan tindak pidana apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana asal yakni pada berdasarkan Pasal 2 ayat (1) berbunyi korupsi, penyuapan, narkotika dan psikotropika, penyeludupan, imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan sejanta gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, sedangkan di bidang kelautan ada tindak pidana perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU pada dasarnya masih memiliki banyak kelemahan meskipun peraturan ini merupakan peraturan kedua setelah UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang kemudian direvisi menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU.

Kelemahan-kelemahan tersebut yang kemudian timbul memicu kritikan yang cukup banyak dari para pakar hukum itu sendiri mulai dari segi teori, segi konsep ataupun pada tataran praktisnya, misalnya dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dijelaskan bahwa untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Namun dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dijelaskan bahwa penyidikan TPPU dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau diperhatikan secara seksama pasal-pasal tersebut bisa saling tumpang-tindih nantinya, bagaimana mungkin kita dapat menentukan bahwa penyidik dari TPPU itu adalah penyidik darimana kalau kita tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya, alangkah lucu jika kemudian tindak pidana asal dari TPPU berasal dari tindak pidana cukai sementara yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari Narkotika Nasional (BNN).

Namun, dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU menjelaskan bahwa penyidikan dalam TPPU dilakukan

oleh penyidik sesuai dengan tindak pidana asal, yang dimaksud dengan tindak pidana asal menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kedudukan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BNN (Badan Narkotika Nasional), serta Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Penyidik kejahatan asal dapat dilaksanakan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan kejahatan asal sesuai kewenangannya. Dengan demikian KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam TPPU apabila kejahatan pencucian uang itu berasal atau *predicate crimenya* merupakan tindak pidana korupsi (Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010).

Pasal 6 huruf b KUHP menjelaskan bahwa penuntut umum merupakan jaksa hal ini juga termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Setelah melihat pengertian penuntut umum yang dijelaskan secara definitif baik dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ataupun dalam KUHP maka definisi penuntut umum yang dimaksud dalam Pasal 76 UU No. 8 Tahun

2010 mengacu pada KUHAP, bahwa kemudian penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang. Pada dasarnya di Indonesia jaksa hanya bekerja pada instansi kejaksaan saja namun seiring perkembangan waktu maka kemudian jaksa tidak hanya bekerja pada instansi kejaksaan saja tetapi juga bekerja pada instansi KPK.

Pada dasarnya KPK dibentuk dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jika kita melihat secara seksama maka tujuan dibentuknya KPK untuk menangani perkara kejahatan korupsi baik itu pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan proses penuntutan dalam tindak pidana korupsi, hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan dua hakim yang melakukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan 3 hakim lainnya dalam putusan sela pada persidangan atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dengan nomor register 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 09 Desember 2013, yakni Hakim I Made Hendra dan Joko Subagyo. Dalam putusan selanya mereka

menyatakan “berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK lembaga itu bertugas menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur mengenai penuntut umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan KPK.

Selanjutnya, Pasal 74 UU TPPU mengatur KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan atas TPPU yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Akan tetapi, UU TPPU tidak mengatur instansi mana memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap TPPU, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan penuntut umum yang menyidangkan perkara kejahatan pencucian uang, merujuk pada KUHAP. Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 71 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, menegaskan berdasarkan surat permohonan pemblokiran yang dikirimkan kepada

penyedia jasa keuangan harus ditandatangani oleh:

Kordinator penyidik pada tingkat penyidikan.

Kepala Kejari pada tingkat penuntutan.

Hakim ketua majelis pada tingkat pemeriksaan pengadilan.

Selanjutnya, dari penjelasan Pasal 71 huruf e UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dapat diketahui, penuntutan TPPU ke pengadilan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari). Ketentuan itu telah berkesuaian dengan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 1 angka 6 KUHP. Apabila mengacu Pasal 72 ayat (5) huruf c UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, melihat adanya kewenangan penuntut umum mengenai surat permintaan keterangan tertulis harta kekayaan yang harus ditandatangani Jaksa Agung atau Kepala Kejati, dalam hal permintaan diajukan jaksa penyidik atau penuntut umum. Lalu, penuntut umum yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU hanya penuntut umum dibawah Jaksa Agung atau di bawah Kepala Kejaksaan Tinggi, sehingga tidak termasuk penuntut umum pada KPK. Penuntut umum pada KPK tidak berada di bawah Jaksa Agung atau Kajati, melainkan pada KPK sendiri. Meski KPK memiliki

kewenangan menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara TPPU.

Hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh KPK harus diserahkan kepada penuntut umum pada Kejari setempat, untuk selanjutnya penuntut umum Kejari melakukan penuntutan ke pengadilan. Hukum acara pidana tidak dapat dianalogikan. Kewenangan tersebut tidak jatuh dari langit, tapi harus ditentukan oleh hukum. KPK menuntut perkara TPPU harus diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Jadi pada dasarnya Penuntut umum KPK tidak mempunyai kewenangan menuntut perkara TPPU ke pengadilan. Pada tahun 2015 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 77/PUU-XII/2014 yang menafsirkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa “menimbang bahwa mengenai Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 yakni ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri yang menurut pemohon hanya penuntut umum pada kejaksaan RI yang berwenang sedangkan penuntut umum pada KPK tidak berwenang, menurut Mahkamah

Konstitusi penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu demi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Apabila TPPU tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014).

Hal tersebut menurut penulis bertentangan dengan asas *opportunitas* yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia, salah satu bentuk dari asas *opportunitas* adalah *dominus litis* yang berarti tidak ada instansi yang berwenang dalam melakukan penuntutan selain instansi kejaksaan. Hal ini kemudian tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana pendapat dari Yance Arizona salah satu dosen fakultas hukum president university, Jakarta mengemukakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Jikalau kita melihat secara seksama maka telah terjadi konflik norma antara norma dari yang kemudian ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dengan sebuah bentuk dari asas *opportunitas* yakni *dominus litis*, sehingga putusan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal penafsiran pasal 76 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak memiliki kepastian hukum sehingga aturan mengenai kewenangan KPK melakukan Penuntutan atas TPPU tidak memiliki aturan yang pasti dalam hukum.

Kedudukan Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindak Pidana Pencucian Uang di Masa Yang Akan Datang

Hukum selalu menjadi bahan perbincangan seluruh khalayak masyarakat, mulai dari perbincangan bagaimana hukum seharusnya, bagaimana hukum yang Rakyat Indonesia cita-citakan hingga bagaimana hukum dalam dalam suatu aturan, untuk mengenal hukum jauh

lebih dalam maka digunakanlah cara pendekatan hukum. Penggunaan konsep yang menggabungkan antara teori hukum alam modern, teori positivis dan teori empiris, dimaksudkan agar apapun yang dihasilkan dengan penggunaan secara seimbang dari ketiga pendekatan dalam mempelajari. Ketiga jenis pendekatan yaitu:

Pendekatan kajian normatif hukum yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan empiris atau '*legal empirical*' yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*) dan seperangkat perilaku (*behavior*).

Pendekatan filsufis, kajian yang memfokuskan dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai atau moral dan ide yang sifatnya abstrak, khusus diantaranya mengenai kajian tentang moral keadilan (Ahmad Ali, 2009).

Dalam keterkaitan antara ketiga pendekatan ilmu hukum tersebut maka hukum pada umumnya dapat dibedakan tiga yaitu 1) *Ius constituendum* adalah hukum ideal yang diharapkan berlaku,

bidang ini didekati dengan pendekatan filsufis, 2) *Ius constitutum* adalah hukum positif, yaitu hukum yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu, untuk suatu waktu tertentu, tetapi belum tentu didalam realitasnya benar-benar berlaku, 3) *Ius operatum* adalah hukum yang di dalam realitasnya benar-benar berlaku (Ahmad Ali, 2009).

Berbicara mengenai kedudukan KPK di masa yang akan datang dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang apabila kita kaitkan diantara kelompok-kelompok hukum melalui tiga pendekatan yakni pendekatan normatif hukum, pendekatan empiris hukum dan pendekatan filsufis maka perbincangan akan lebih banyak berada dalam tataran hukum ideal yang diharapkan berlaku dan diimpikan oleh setiap kalangan masyarakat atau *Ius constituendum*. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita harus melihat secara hukum yang diterapkan dalam masyarakat (*Ius constitutum*) perihal kedudukan kewenangan KPK dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan juga kita perlu melihat bagaimana realitas yang terjadi dikalangan masyarakat (*Ius operatum*) perihal kedudukan kewenangan KPK dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana

pencucian uang. Setelah kita mengkaji bagaimana hal tersebut didalam sudut pandang hukum yang diberlakukan dan juga setelah kita mengkaji dari sudut pandang realitas maka kita dapat mengambil sebuah deksriptif atau sebuah gambaran mengenai kedudukan kewenangan KPK dalam hal melakukan penuntutan atas TPPU di masa yang akan datang dan ideal bagi Rakyat Indonesia.

Pada dasarnya jika kita melihat kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak memiliki dasar hukum. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 6 huruf b menjelaskan salah satu kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi memeriksa, mengadili dan mengutus suatu perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) berasal dari tindak pidana korupsi. Jika kita melihat secara seksama perkara tindak pidana pencucian uang bisa diperiksa, diadili, dan diputus perkaranya dalam pengadilan tindak pidana korupsi asal tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi, aturan ini yang pada dasarnya memberikan kesempatan KPK melakukan penuntutan atas TPPU, tetapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah

KPK hanya satu-satunya instansi yang dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa suatu tindak pidana korupsi.? Indonesia juga dikenal suatu instansi yang berwenang melakukan penuntutan yakni instansi kejaksaan bahkan instansi kejaksaan ini merupakan dominus litis dalam sebuah penuntutan yang berarti tiada instansi yang berwenang untuk melakukan suatu penuntutan kepada terdakwa melainkan instansi kejaksaan.

Selain daripada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan penuntutan atas TPPU, UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU pada Pasal 76 tidak menjelaskan siapa yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, ditambah dengan penjelasan pasal 76 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU hanya mengatakan cukup jelas. Hal tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Namun, hal yang menggugurkan kesemuanya adalah kewenangan KPK yang termaktub dalam UU No. 30 Tahun 2002.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 menjelaskan pada pasal 6 huruf c bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

dalam tindak pidana korupsi. Apabila kita melihat secara seksama maka KPK hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi saja tidak untuk tindak pidana lainnya khususnya tindak pidana pencucian uang. Menambahkan mengenai kewenangan Peter de Haan menyatakan bahwa kewenangan pemerintah tidak jatuh dari langit tetapi ditentukan oleh suatu Undang-Undang (*Overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*) (P. Daen, 1986).

Karena tidak ada satu aturan pun yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang maka secara *ius constitutum* atau dalam hukum positif KPK tidak berwenang untuk melakukan penuntutan atas TPPU. Setelah berbicara dalam tataran *Ius Constitutum* maka selanjutnya untuk membuat kedudukan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan atas TPPU di masa yang akan datang maka kita juga harus mengkaji secara *Ius Operatum* atau melihat realita yang terjadi di masyarakat.

Berbicara mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan atas TPPU jika kita kaji secara *Ius Operatum* atau berbicara mengenai apa yang terjadi

di masyarakat pada dasarnya KPK melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Banyak kasus yang terjadi dimana penuntut umum dari KPK melakukan penuntutan kepada terdakwa selain dari tindak pidana korupsi juga melakukan penuntutan kepada terdakwa dengan TPPU misalnya pada kasus Nazaruddin di Hambalang, kasus Djoko Susilo, kasus Ahmad Fathanah dan kasus yang diusut baru-baru ini yakni pada akhir tahun 2014 yakni bupati Karawang yang dituntut oleh Penuntut Umum KPK dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KPK sendiri tidak memiliki kewenangan dalam sebuah aturan tertulis dalam melakukan penuntutan atas TPPU akan tetapi penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mencari kepastian hukum saja, tetapi juga bertujuan untuk mencari keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Seorang terdakwa yang telah melakukan pengaburan harta kekayaannya atas hasil korupsi dengan melakukan TPPU dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disuatu persidangan pemeriksaan biasa akan tetapi di vonis bebas lepas oleh hakim karena penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tersebut tidak mempunyai memiliki aturan

yang jelas dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, apakah kemudian hal ini adil kalangan masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidananya itu sendiri. Ketika kita menganalogikan sebuah metilon yang tidak diklasifikasikan sebagai narkoba baik narkoba golongan 1,2 ataupun narkoba golongan 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi menimbulkan efek yang sama dengan narkoba golongan 1, pertanyaan yang kemudian apakah adil ketika seorang terdakwa yang telah terbukti mengedarkan metilon ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipersidangan akan tetapi divonis bebas oleh hakim karena bukan termasuk dalam klasifikasi narkoba meskipun efek yang ditimbulkan sama dengan narkoba golongan 1.

Menurut Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Gustav Radbruch mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*Gezetz*) kadang kala terdapat *Gezesliches Unrecht*, yakni ketidakadilan didalam undang-undang. Kemudian jikalau

kita kaitkan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan ditinjau dari segi *ius operatum* atau yang terjadi di masyarakat bahwa KPK melakukan penuntutan atas TPPU hal tersebut meskipun didukung dengan adanya putusan pengadilan tinggi kepada Luthfi Hasan Ishaaq yang kemudian divonis bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana korupsi selama 16 tahun (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor register 14/PID/TPK/2014/PT.DKI).

Setelah kita mengkaji dari sudut pandang *Ius Constitutum* dan *Ius Operatum* maka sejatinya kita dapat menggambarkan bagaimana kedudukan KPK di masa yang akan datang secara ideal dalam hal kewenangan melakukan penuntutan dalam TPPU. Berbicara mengenai hal yang ideal dimasa depan atau hukum yang kita impikan tidak akan lepas dari tiga tujuan hukum menurut ajaran konvensional yakni:

Ajaran Etis dengan Tujuan Keadilannya

Keadilan merupakan hal yang abstrak dan sangat bersifat subjektif, apa yang menurut saya adil belum tentu teman saya merasakan hal tersebut adil. Ada

beberapa definisi dari pakar berkenaan dengan apa itu keadilan, ada yang menghubungkan keadilan dengan peraturan politik negara, sehingga batas mengenai apa yang menjadi hak atau bukan, senantiasa didasarkan pada batas yang telah ditentukan oleh negara. Selain itu, ada juga yang memberikan pandangan soal keadilan dalam wujud kemauan yang sifatnya terus-menerus, untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang yang mencari keadilan. Juga ada yang melihat asas keadilan sebagai pembenaran bagi implementasi hukum, yang diperlawankan dengan sewenang-wenang. Demikian juga ungakapan tentang keadilan, ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya di ruang persidangan pengadilan, melainkan di manapun, dan harus dibersihkan dari kekotoran scandal dan korupsi (Ahmad Ali, 2009).

Bahkan dengan nada humor, Benjamin N. Cardozo seolah memperlakukan keadilan sebagai seorang wanita, yang tidak untuk diserbu habis, melainkan untuk dirayu beliau juga mengatakan bahwa proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri dari regenerasi, dan secara terus

merasakan perubahan yang merupakan kehadiran yang berani dan terbaik.

Dengan demikian berdasarkan ungakapan diatas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwsanya tidak ada keadilan yang sempurna yang ada hanyalah pencapaian keadilan dalam kadar tertentu saja. Adapun yang sebagian orang yang meyakini bahwa keadilan adalah kelayakan, N. E. Algra menyatakan bahwa apakah sesuatu itu adil (*rechvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan “itu adil”. Tetapi mengatakan “hal itu saya anggap adil”. Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.

Ajaran Utilistis dengan Tujuan Kemanfaatannya

Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilistis. Penganut aliran utilistis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memeberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat

sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya (Ahmad Ali, 2009).

Salah satu pakar ajaran utilitarian ini adalah Jeremy Bentham yang merupakan seorang filsuf ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari benang “prinsip kegunaan” menjadi sebuah kain doktrin dalam etika dan ilmu hukum yang luas dan dikenal sebagai mazhab utilistis. Utilitarianisme atau *utilism* lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini merupakan aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Asas kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam suatu masyarakat. Prinsip manfaat yang dinyatakan secara kabur, jarang sekali dibantah umum; prinsip ini bahkan dipandang sebagai hal yang umum ditemukan dalam bidang politik dan

moral. Namun, kesepakatan umum yang sifatnya nyaris universal ini baru tampak di permukaan. Prinsip ini tidak menghasilkan gagasan yang sama dan nilai yang sama; prinsip ini tidak menghasilkan cara penalaran yang seragam dan logis (Jeremy Bentham, 2013).

Ajaran Dogmatik Hukum dengan Kepastian Hukumnya

Menurut Ahmad Ali, Aliran ini bersumber dari pemikiran kaum yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum dan asas-asas hukum. (Ahmad Ali, 2009)

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum, yang dipersepsikan hanya sekedar kepastian undang-undang. Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan didalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apa pun kehidupan bernegara dan bermasyarakat,

tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Pada dasarnya kepatian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukam; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukakn oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan adanya konsistensi sebuah putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Jika kita dapat mencermati tiga tujuan menurut aliran-aliran yang berbeda

sesuai ajaran konvensional maka kita dapat menyimpulkan ada tiga hal yang ingin dituju oleh hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut yang sangat diperlukan untuk hukum yang kita impikan atau hukum yang ideal dimasa yang akan datang.

Hukum sendiri pada dasarnya diciptakan untuk membuat keadilan dari keadilan tersebut harusnya memiliki sebuah kepastian hukum dan pada saat diimplementasikan kepada masyarakat dapat bermanfaat. Ketiga tujuan hukum tersebut seharusnya berjalan secara beriringan dan tidak hal yang paling dominan diantara ketiga tujuan tersebut.

Menurut pakar hukum yaitu Sudikno Mertokusumo sendiri mengemukakan bahwa hukum itu bertujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan, itu berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan dalam TPPU dari sudut pandang yang hukum yang dicita-citakan dimasa yang akan datang KPK harus diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam TPPU. Jikalau kita kembali melirik apa itu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka menurut penulis menganggap jikalau kemudian KPK tidak

mempunyai kewenangan dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang maka ketiga tujuan hukum tersebut sangat sulit diraih. Karena dalam konsep keadilan diperlukan kepastian hukum dan dalam kepastian hukum diperlukan keadilan yang berdampak sistemik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentu saja masih sering akan terjadi overlapping dan tidak jelasnya aturan-aturan. Oleh karena itu dari sudut pandang hukum yang kita cita-citakan sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya KPK dimasa yang datang diberikan wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang agar tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai, sehingga kedudukan kewenangan KPK untuk dimasa yang datang dalam hal melakukan penuntutan atas TPPU tidak menjadi hal yang kontroversial.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan adalah KPK tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam TPPU yang didasarkan pada Pasal 76 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU hanya menjelaskan redaksi kata penuntut umum, sementara yang kita ketahui bahwa penuntut umum menurut KUHP merupakan jaksa. Jaksa

sendiri ada yang bekerja pada instansi KPK dan ada yang bekerja pada instansi Kejaksaan, sedangkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 bahwa KPK hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas TPPU. Secara *Ius Constitutum* apa yang berlaku dalam sebuah aturan ataupun lebih dikenal dengan undang-undang maka KPK tidak memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, berbeda halnya jikalau kita berbicara dalam tataran *Ius Operatum* atau secara empirik dengan melihat apa yang terjadi dalam masyarakat bahwa KPK dirasa perlu untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian yang dimana TPPU merupakan *double-track criminality* dimana terdapat tindak pidana asal dan lanjutan, dalam hal ini jikalau TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal secara empiris maka KPK tetap melakukan penuntutan karena masih memiliki kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.

- Jeremy Bentham, (2013) *Teori Perundang-Undangan*. Bandung, Nuansa Cendekia dan Nusamedia.
- P. de Haan, (1986), *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, Deel 1*, Kluwer, Deventer.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbana, (2013) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.